

KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

Liyani (20130520117)

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan salah satunya dengan membuat program keluarga harapan (PKH) atau lebih dikenal sebagai program bantuan bersyarat. Program keluarga harapan di Indonesia pertama kali diimplementasikan tahun 2007 di tujuh provinsi sedangkan di DIY termasuk Kabupaten Bantul PKH mulai dilaksanakan tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul tahun 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menjelaskan proses yang sebenarnya serta diambil kesimpulannya secara umum. Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Dinas Sosial Kabupaten Bantul terkait kinerja Dinas Sosial.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan terkait kinerjanya yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia sudah efektif. Dari segi sosialisasi, monitoring serta evaluasi diberikan secara optimal. Meski masih adanya kendala dalam data validasi masih banyak ketidak validan data akan tetapi Dinas Sosial Kabupaten Bantul mampu menangani permasalahan tersebut karena dari tahun ketahun adanya penurunan tingkat kemiskinan.

Kata kunci : Kinerja, Program Keluarga Harapan (PKH)

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang selalu dihadapi pemerintah dari tahun ke tahun, Kemiskinan merupakan realitas dan sekaligus menjadi masalah sosial yang selalu hadir ditengah-tengah masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang butuh penanganan dan program khusus. Masalah Kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kemiskinan yang terjadi serta tingkat kesulitan mengatasinya. Semua negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban.

Kemiskinan memang merupakan persoalan multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik. Kerena sifat multidimensional tersebut maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial (social well-being). Untuk mengejar seberapa jauh seseorang memelurkan kesejahteraan materi dapat diukur secara kuantitatif dan obyektif seperti dalam mengukur Kemiskinan absolut yaitu ditunjukkan dengan angka rupiah.

(Awan, Eds:1995:31) Subtansi kemiskinan adalah kondisi deprevasi terhadap sumber-sumber pemenuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan dan pendidikan dasar. Dalam syariat islam, ukuran kemiskinan adalah kurang dari hisaf zakat. Apabila seseorang berada dibawah ukuran satu hisaf zakat maka seseorang tersebut sulit memenuhi kebutuhan dasar. Banyaknya penduduk Indonesia dengan jumlah populasi sekitar 255 juta penduduk, Indonesia merupakan jumlah penduduk terbanyak nomor

empat di dunia. Sehingga populasi angka kemiskinan semakin meningkat karena padatnya jumlah penduduk.

Dalam menangani setiap masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program serta stimulus guna mengatasi kemiskinan. Program khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan salah satunya adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang didirikan sejak tahun 2007.

Adapun upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan pemerintah, salah satunya dengan membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 124/2001 jo Keppres RI No-8/2A02 io Keppres RI No. 34/2002. Komite ini melibatkan berbagai aktor, yaitu: akademisi, LSM, pelaku usaha, birokrasi daerah, onnas/ orsospol, dan lembaga keuangan bank dan non bank. KPK dibentuk untuk menanggulangi kemiskinan yang didasarkan atas pemberdayaan masyarakat.

Di Indonesia Program Keluarga Harapan pertama kali di implementasikan pada tahun 2007 dengan uji coba di tujuh provinsi (Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara dan Gorontalo). Sedangkan untuk DIY, termasuk Kabupaten Bantul, PKH mulai dilaksanakan pada tahun 2008 berbarengan dengan Aceh, Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (Nainggolan, 2012).

Dalam menentaskan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 06 tahun 2013 tentang penanggulangan

kemiskinan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas serta mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan ber usaha masyarakat miskin.
- b. Memperkuat tugas masyarakat miskin untuk mengambil keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. Mewujudkan kondisi serta lingkungan ekonomi, politik dan sosial memungkinkan warga miskin mendapatkan kesempatan yang besar dalam pemenuhan hak-hak dasar dan meningkatkan taraf hidup;
- d. Terciptanya rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rawan miskin; dan
- e. Menurunkan angka masyarakat miskin.

Direktorat Jaminan Sosial (2008:17) Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan maupun pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 akan mengadakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini serupa dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) di negara lain atau bantuan tunai bersyarat. Program ini tidak dimaksudkan untuk kelanjutan Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) tetapi diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin serta mempertahankan daya belinya pada saat Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Maksud dari PKH merupakan upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan ini yaitu untuk mengurangi angka dan memutus rantai Kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs).

Direktorat Jaminan Sosial (2008:18) dalam PKH bantuan diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) sebagai imbalannya RTSM diwajibkan untuk menyekolahkan anak mereka, melakukan pemeriksaan kesehatan dibidang pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan untuk ibu hamil. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait tingkat pendidikan dan kesehatan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, untuk tingkat minimal sekalipun.

Direktorat Jaminan Sosial (2013:19) Program Keluarga Harapan diperuntukkan untuk Keluarga Sangat Miskin. Data keluarga yang menjadi peserta PKH didapat dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria dalam program berikut, yaitu: memiliki ibu hamil/ nifas/ anak balita, memiliki anak usia 5 sampai 7 tahun yang belum terdaftar di pendidikan dasar (anak pra sekolah), anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7 sampai 12 tahun, anak SLTP/ MTs/ Paket B/ SMLB (Usia 12-15), anak 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dalam hal ini juga termasuk anak dengan disabilitas.

Adapun Landasan Hukum pemberian Program Keluarga Harapan adalah:

- a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
- c. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
- e. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Disamping masalah kemiskinan masih menjadi persoalan serius didalam implementasi PKH masih ditemukan berbagai permasalahan. BPK RI masih menemukan permasalahan dalam pelaksanaan PKH Tahun 2012, antara lain komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung PKH masih kurang, proses validasi tidak sesuai ketentuan sehingga hasil validasi tidak akurat, proses verifikasi atas komitmen peserta PKH terhadap kesehatan dan pendidikan belum optimal, tidak ada keseragaman kebijakan yang ditetapkan oleh Kemensos sehingga pembayaran bantuan menjadi kurang efektif dan monitoring rutin/berkala dan evaluasi belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum.

Di Bantul penerimaan Program Keluarga Harapan masing kurang valid. Pemerintah Kabupaten Bantul memperkirakan terdapat 3.000 data yang tidak valid dan perlu di verifikasi ulang agar penerima Program Keluarga Harapan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengantongi 21.000 penerima Program Keluarga Harapan namun data yang didapatkan dari pemerintah pusat tersebut banyak yang tidak valid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Bapak Mahmudi “dari jumlah 21.000, dia memperkirakan terdapat 2.000 sampai 3.000 data yang tidak valid. Dia mengatakan dari data 21.000 tersebut banyak yang sudah meninggal, namanya tidak ada, dan ada pula yang dobel, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi. Data yang tidak valid tersebut menurutnya karena merupakan data lama dari pemerintah pusat. Banyaknya jumlah PKH yang harus diverifikasi tersebut menurut dia karena Pemerintah Pusat membah kriteria bagi penerima PKH. Selain itu mereka yang menadapatkan PKH adalah keluarga miskin yang dalam keadaan hamil, memiliki anak bayi, balita, TK, SD, SMP, SMA, lansia, dan penyandang disabilitas berat.

B . Rumusan Masalah

1. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul tahun 2016.

C. Tujuan penelitian

- a. Berdasarkan dari rumusan masalahnya yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH)
- c. Untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat mengubah wawasan pengetahuan pembaca tentang pelaksanaan program yang mengikutsertakan masyarakat bagaimana pelaksanaan program dan faktor – faktor yang ada di program itu.
2. Secara praktis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan Dinas Sosial dan pihak yang terkait serta mengikutsertakan masyarakat dalam program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk masyarakat Kabupaten Bantul yaitu sebagai sumber pengetahuan bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori

1. Kinerja

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2006:67) kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Stolovitch and Keep (1992) kinerja didefinisikan sebagai seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Menurut Griffin (1987), kinerja adalah salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja. Menurut Hersey and Blanchard (1993) kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Demi penyelesaian tugas atau pekerjaan seseorang harus mempunyai derajat kesediaan dan kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidak cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa adanya pemahaman yang mendalam terkait apa yang akan dikerjakan serta bagaimana mengerjakannya.

Menurut Agus Dwiyanto (2006:50-51) beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

1. Produktifitas kerja:

- Sikap aparat, dalam menjalankan tugasnya dilihat dari kesediaan dan inisiatif para pegawai dalam bekerja secara efektif dan efisien.

- Kemampuan, diharapkan aparatur mempunyai keahlian dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab dalam pekerjaannya.
- Semangat kerja, diartikan sebagai sikap antusiasme pegawai dalam menjalankan tugas. Sikap ini dilihat dari komitmen dan kemauan tinggi pegawai dalam menjalankan tugasnya.

2. Kualitas layanan

Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas pelayanan publik. Menurut Dwiyanto, dengan demikian tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas yang dimaksud disini adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.

4. Responsibilitas

Poin penting responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun yang implisit.

5. Akuntabilitas

Pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat diharapkan dapat terus secara konsisten memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan norma-norma dalam masyarakat.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Suharno, 2013:11) dalam Budi Winarno yang menyatakan kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.

Kemudian definisi lain disampaikan Pressman dan Widavsky (Winarno, 2002:7) sebagaimana yang dikutip oleh Budi Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta, hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintahan.

3. Program Keluarga Harapan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan basis pemberian bantuan sosial yang ada setelah BLT adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan dana bersyarat. dimana program bantuan sosial dan perlindungan ditujukan untuk pemenuhan hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang berdampingan dengan program Jamkesmas, Raskin, dan juga BSM (Bantuan Siswa Miskin). Secara konseptual Program Keluarga Harapan (PKH)

adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dr Agus Salim (2006:40) Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebenarnya menekankan pada proses, ini berarti, tatkala menghadapi fenomena yang memang dapat diukur, fenomena tersebut diteliti/diukur tidak secara ketat, sebagaimana dilihat dari kualitas, jumlah, intensitas atau frekuensi yang menyertainya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Pemilihan Dinas Sosial sebagai lokasi penelitian ini didasarkan atas keinginan untuk mengetahui bagaimana kinerja yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat.

3. Teknik Jenis Data

a). Data Primer

Bagong Suyanto (2005:55) Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Teknik yang

dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner.

b). Data sekunder

Bagong Suyanto dan Sutinah (2005:55-56) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, seperti Biro Pusat statistik, buku, jurnal dan dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dengan mempelajari data yang mendukung penelitian yang diperoleh dengan menggunakan tehnik dokumentasi, yaitu dengan menggunakan dokumen yang ada sebagai bahan literatur yang didapat dari, buku , jurnal, media massa, serta sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara (interview) biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang yang lazim disebut responden dengan berbicara langsung dengan orang tersebut. Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif yaitu dimana bentuk analisis yang dilakukan dengan menggambarkan dan menganalisa data untuk memberikan informasi dan dapat memberikan pemahaman terkait pokok permasalahan secara rinci dan sistematis.

PEBAHASAN

1. Produktivitas

pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat dilihat dari faktor produktivitas dapat di simpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul sudah efektif dan efisien. Hal tersebut diperoleh dari hasil output yang didapatkan selama Program Keluarga Harapan berlangsung bahwa target telah sesuai dengan apa yang diharapkan, bahkan dengan adanya Program Keluarga Harapan dapat menurunkan angka kemiskinan di tahun 2016 serta mengalami kemajuan yang lebih signifikan dari tahun sebelumnya.

2. Kualitas Layanan

Program Keluarga Harapan dalam kualitas layanan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik dalam menjalankan program tersebut, di sisi lain apabila nantinya ada permasalahan selama program berlangsung, diharapkan penyelenggara dapat segera mengatasinya agar tidak terjadi masalah besar dan berefek terhadap program.

3. Responsivitas

Responsivitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Program Keluarga Harapan guna menurunkan angka kemiskinan sudah berjalan baik. Dinas Sosial telah melaksanakan sesuai tanggung jawab, wewenang, prosedur dalam pelaksanaan setiap kegiatan dan menerima kritik dan saran maupun keluhan dari masyarakat.

4. Responsibilitas

Responsibilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam Program Keluarga Harapan berjalan dengan efektif dan efisien dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai visi dan misi penerapan Program Keluarga Harapan serta sesuai dengan tujuan dan sasaran utama.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang memuat tanggung jawab, evaluasi, dan keterbukaan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah dijalankan dengan maksimal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dibuktikan bahwa hingga saat ini belum ada keluhan mengenai kurangnya atau ketidak nyamannya atas tanggung jawab yang di berikan petugas kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh penulis dapat di simpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul sudah cukup baik hanya saja masih ada perlu peningkatan dalam menangani data atau validasi.

DAFTAR PUSTAKA

Awan, S. Dewanta.(Eds) 1995. Kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia.
Yogyakarta: Aditya Media

Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan
Sosial Departemen Sosial RI, Pedoman Umum PKH 2008

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jasmani Sosial.
Kementrian Sosial RI, pedomamn umum Keluarga Harapan. (Ed. Revisi, 2013)

Efendi, Sofian. unsur-unsur penelitian ilmiah. LP3S, Jakarta, 1985.

Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT
gramedia,Jakarta,1991

Moloeng, J Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, remaja karya, 1995

Mutiarin, Dyah dan Arif Zaenudin. 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan

Salim, Agus. 2006. Teori & Pradigma Penelitian Sosial.

Suharno. 2013, Dasar-dasar Kebijakan Publik; Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005.Metode Penelitian Sosial.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media
Pressindo.

http://www.kompasiana.com/kuncoromm/kemiskinan-sebagai-sebuah-tantangan_551714df81331188669de168 diakses pada 20 April 2017 pukul 19:15 WIB

<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67> diakses pada 20 April 2017 pukul 21:00 WIB

<https://www.google.co.id/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/program-keluarga-harapan-apa-manfaat-yang-ditawarkan> diakses pada 21 April 2017 pukul 23:22 WIB

<http://peraturan.go.id/inc/view/11e6c5b109e7e290b0ac313330343434.html> diakses pada 25 April 2017 pukul 09:09 WIB

<http://www.idsalim.com/2016/08/dasar-hukum-program-keluarga-harapan-pkh.html> diakses pada 29 April 2017 pukul 13:12 WIB